

EVALUASI IMPLEMENTASI PERMEN PANRB NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL DI DISKOMINFO KOTA BANDUNG

EVALUATION IMPLEMENTATION MINISTER OF EMPOWERMENT STATE APPARATUS AND BUREAUCRATIC REFORMS BECREE NUMBER 59 OF 2020 ABOUT OBSERVING AND EVALUATING SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ON INTERNAL POLICY DOMAIN IN DISKOMINFO BANDUNG CITY

Ratih Syaidah¹, Lukman Abdurrahman², Ryan Aditya Nugraha,³

^{1,2,3} Universitas Telkom, Bandung

¹ ratihnya@student.telkomuniversity.ac.id, ²abdural@telkomuniveristy.co.id,

³ranugraha@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan teknologi informasi yang dimiliki pemerintahan Indonesia mengeluarkan Pedoman evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan implementasi e-government. Evaluasi dengan menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap Tingkat Kematangan proses yang ada. SPBE terdiri dari beberapa domain, namun dalam penelitian kali ini berfokus pada domain kebijakan internal. Dengan melakukan sebuah evaluasi kesesuaian tingkat kematangan berdasarkan SPBE untuk domain kebijakan internal pada aspek kebijakan internal tata kelola melalui peninjauan data dukung yang tersedia serta penilaian secara mandiri terhadap data dukung berdasarkan pedoman penilaian Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Penelitian ini berhasil menyesuaikan evaluasi tingkat kematangan dengan hasil indeks domain kebijakan internal sebesar 3,3 dengan mencakup 1 aspek domain yakni aspek kebijakan internal tata kelola dengan total keseluruhan indikator sebesar 10 indikator. Kemudian rekomendasi yang diberikan nantinya akan digunakan sebagai masukan untuk menjaga kualitas tingkat kematangan level atau dapat meningkatkan indeks SPBE untuk kelangsungan pelaksanaan SPBE Diskominfo Kota Bandung.

Kata kunci : SPBE, kebijakan internal, tingkat kematangan, E-government, Permen PANRB 59/2020

Abstract

The implementation of information technology owned by the Indonesian government issued SPBE evaluation guidelines to measure the maturity level of e-government implementation. Evaluation using the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 59 of 2020 is intended to conduct an assessment of the Maturity Level of the existing process. SPBE consists of several domains, but in this study it focuses on the internal policy domain. By conducting an evaluation of the suitability of the maturity level based on the SPBE for the internal policy domain on the internal policy aspect of governance through a review of the available supporting data and an independent assessment of the supporting data based on the PANRB Regulation Number 59 of 2020. The result of the internal policy domain index is 3,9 covering 1 domain aspect, namely the internal policy aspect of governance with a total of 10 indicators. Then the recommendations given will be used as input to maintain the quality of the maturity level or can increase the SPBE index for the continuity of the SPBE Diskominfo Bandung City.

Keywords: SPBE, Internal Policy, Maturity Level, E-Government, Permen PANRB 59/2020

1. Pendahuluan

E-Government merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dibidang pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) [1]. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang merupakan pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE seperti pemerintahan, masyarakat, dan pelaku usaha [2]. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan internal berupa

tata kelola dan layanan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Pemerintah Kota Bandung tahun 2019 dengan nilai indeks 2.57 dengan kategori predikat yakni masuk kategori “Cukup” [3]. Kemudian untuk indeks domain kebijakan SPBE itu sendiri ada pada nilai 3,06 dimana ini masih menggunakan hasil berdasarkan panduan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018.

Penerapan untuk implementasi assessment yang sekarang merujuk kepada panduan permen PANRB No.59 Tahun 2020 dimana adanya pengurangan untuk aspek pada domain kebijakan internal pada indicator yang semula dari 7 indikator menjadi 10 indikator [4]. Artinya dengan indeks yang telah dievaluasi sebelumnya belum cukup mampu mencapai indeks kategori tingkat kematangan keabilitas proses.

Evaluasi adalah penilaian terhadap data yang telah di kumpulkan melalui kegiatan asesmen [5]. Evaluasi tingkat kematangan yang digunakan selama penelitian menggunakan model tingkat kematangan keabilitas proses yang digunakan secara luas dalam dunia pengembangan perangkat lunak dengan istilah yang dikenal sebagai CMM/CMMI (Capability Maturity Model). Kemudian melakukan formulasi terhadap setiap evidence ke dalam angka tingkat kematangan serta melakukan perhitungan nilai indeks aspek dan domain [6]. Selanjutnya hasil dari evaluasi tingkat kematangan akan ditampilkan dalam predikat tingkat kematangan domain Tata Kelola yang ditampilkan dalam skala predikat berdasarkan aturan predikat penilaian SPBE.

2. Dasar Teori

2.1 SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang merupakan pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE seperti pemerintahan, masyarakat, dan pelaku usaha [7].

2.2 Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE [8].

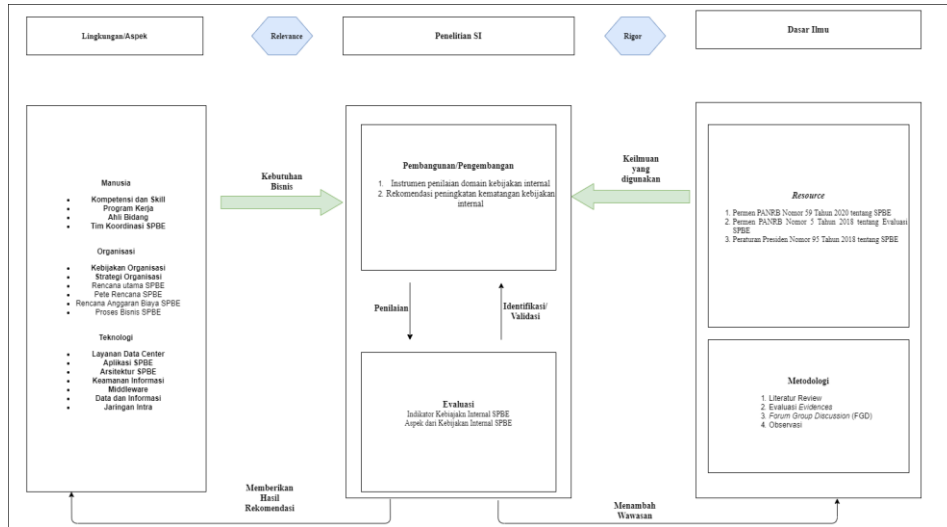
2.3 Tata Kelola TI (Kebijakan Internal)

IT Governance adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh IT Governance Insti-tute (ITGI) sebagai "bagian integral dari tata kelola perusahaan, yang terdiri dari struktur organisasi dan kepemimpinan, serta proses yang memastikan bahwa organisasi TI tersebut mendukung strategi dan tujuan organisasi [9]. Tata kelola TI jauh lebih luas dan berfokus dalam memenuhi tuntutan pelanggan dan bisnis. Kebijakan internal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi dan sarana internal.

3. Metode Penelitian dan Persiapan

3.1 Model Konseptual

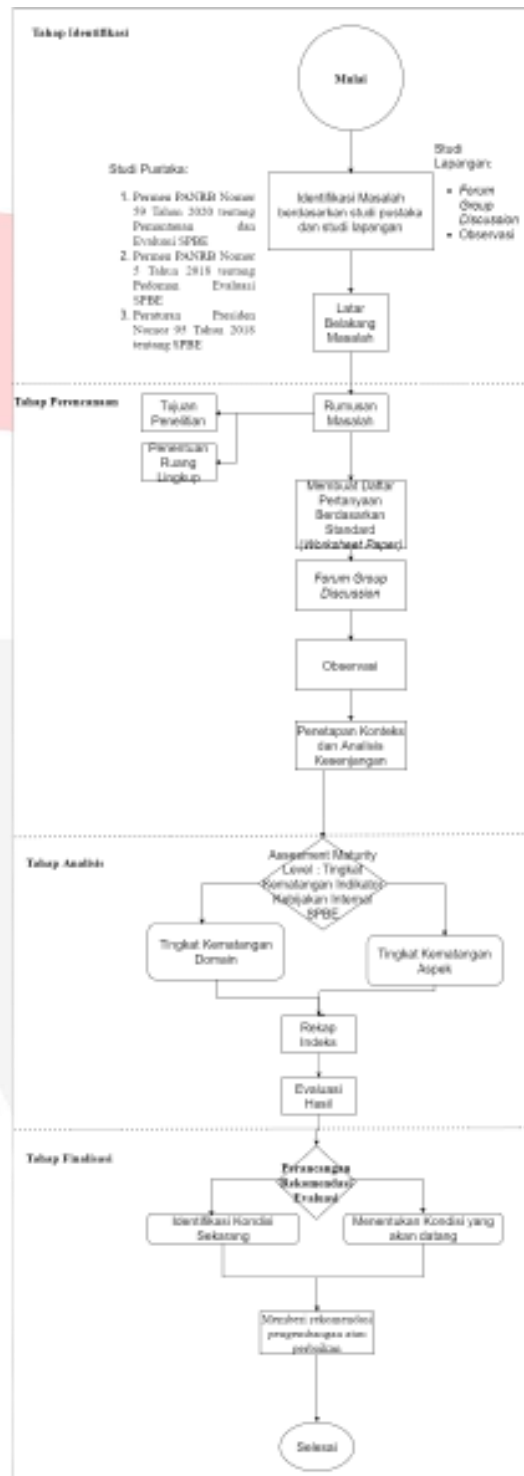
Model konseptual di dalam proses penelitian memiliki 3 proses utama, yakni input, proses, output yang terdapat pada Gambar 1. Dengan model konseptual dibawah ini akan membantu dalam melakukan evaluasi dan penerapan terhadap beberapa aspek dalam penelitian.



Gambar 1. Konseptual Model

3.2 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan alur proses yang dilakukan dalam membangun IT artefact serta cara mengevaluasinya. Tahap ini divisualisasikan menyesuaikan dengan topik penelitian yaitu cara melakukan verifikasi dan validasi proses evaluasi ke dalam domain Kebijakan Internal Tata Kelola seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Sistematika Penelitian

Tahap inialisasi merupakan tahap awal dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting atau kondisi terkini yang ada di dalam domain Kebijakan Internal SPBE. Tahap tersebut juga membantu peneliti dalam mengetahui seperti apa penilaian yang telah dilakukan sebelumnya dan keterkaitannya dengan penelitian sekarang. Selanjutnya, tahap perencanaan dilaksanakan untuk menjawab hasil dari observasi pada tahap inialisasi dengan mengusung pembuatan lembar penilaian yang dibutuhkan dalam proses analisa serta melakukan wawancara terkait pengumpulan informasi. Tahap analisa dilaksanakan ketika proses wawancara telah mendapatkan data yang dibutuhkan sehingga dilaksanaka analisa dapat dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Di akhir penelitian, terdapat proses finalisasi yang merupakan proses akhir dalam penelitian dalam menentukan hasil analisa dengan kondisi harapan yang akan memberikan rekomendasi perbaikan ataupun peningkatan terkait seluruh indikator yang telah dinilai.

4. Pembahasan

Bagian pembahasan berisikan uraian tentang pedoman penilaian hingga pembahasan hasil evaluasi dan rekomendasi peningkatan pelaksanaan domain Tata Kelola SPBE.

4.1 Daftar Indikator Penilaian

Tabel 1. Daftar Aspek dan Indikator

Aspek SPBE	Indikator
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indikator - 1: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
	Indikator - 2: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
	Indikator - 3: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data
	Indikator - 4: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
	Indikator - 5: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
	Indikator - 6: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra
	Indikator - 7: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
	Indikator - 8: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
	Indikator - 9: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Indikator - 10: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

Tabel 1 memaparkan semua aspek dan indikator yang ada di dalam domain Kebijakan Internal SPBE. Hasil tabel menunjukkan bahwa terdapat sepuluh (10) indikator dan satu (1) aspek yang ada di dalam domain. Setiap indikator akan ditentukan tingkat kematangannya berdasarkan data dukung dan observasi yang dilakukan.

4.2 Kriteria Penilaian Tingkat Kematangan

Tingkat Kematangan Proses merupakan pengukuran terhadap suatu proses yang didalam diorganisasi yang digunakan untuk mengukur aspek kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE. Terdapat 5 tingkatan kriteria penilaian, yakni rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Kematangan

Tingkat	Kriteria
1-Rintisan	Kebijakan Internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan
2-Terkelola	Kebijakan Internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas – aktivitas penerapan kebijakan tersebut
3-Terdefinisi	Kebijakan Internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas – aktivitas penerapan kebijakan tersebut
4-Terpadu dan Terukur	Kebijakan Internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut
5-Optimum	Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan

4.3 Predikat Penilaian SPBE

Predikat penilaian indeks SPBE dibagi atas beberapa kelompok dengan perhitungan skala 1 – 5 berdasarkan tabel dibawah ini

Tabel 3. Predikat Penilaian SPBE

Nilai Indeks	Predikat
4.2 – 5.0	Memuaskan
3.5 - <4.2	Sangat Baik
2.6 - <3.5	Baik
1.8 - <2.6	Cukup
<1.8	Kurang

4.4 Penentuan Tingkat Kematangan

Penentuan tingkat kematangan digunakan dalam mengetahui angka tingkat kematangan yang ada di dalam indikator pada domain Kebijakan Internal SPBE di Diskominfo Kota Bandung. Pengelompokan tingkat kematangan dibedakan berdasarkan aspeknya, kemudian dilakukan perhitungan tingkat kematangan per indikator serta menentukan nilai indeks tiap aspek.

Tabel 4. Tingkat Kematangan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Nomor Indikator	Penjelasan Indikator	Tingkat Kematangan
Indikator – 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	5
Indikator – 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	4
Indikator – 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
Indikator – 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
Indikator – 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
Indikator – 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	5
Indikator – 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5
Indikator – 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
Indikator – 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
Indikator – 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	1
Indeks Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola		3,30

Tabel 4 menampilkan hasil terkini terkait penilaian tingkat kematangan tiap indikator yang ada di dalam domain Kebijakan Internal SPBE. Sesuai dengan predikat penilaian SPBE yang diatur di dalam Permen PANRB 59/2020, aspek yakni Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE mendapat predikat “Baik” dan masuk skala penelitian 3 yakni “Terdefinisi”.

Tabel 5. Indeks Tata Kelola SPBE

Aspek	Indeks
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,30
Indeks Kebijakan Internal SPBE	3,3

Tabel 5 menunjukkan perolehan Indeks Kebijakan Internal SPBE pada Diskominfo Kota Bandung sebesar 3,3 dengan predikat “Baik”. Gambaran terkait indeks tingkat kematangan aspek pada domain Tata Kelola SPBE dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Indeks Aspek Kebijakan Internal SPBE

Gambar 3 memaparkan ketiga aspek yang ada di dalam Kebijakan Internal SPBE pada Diskominfo Kota Bandung. Grafik diatas memaparkan seluruh aspek yang ada beserta tingkat kematangannya masing-masing.

4.5 Rekomendasi

Rekomendasi berdasarkan Analisa GAP untuk memnuhi adanya saran atau masukan juga perbaikan yang akan ditujukan kepada instansi penelitian. Rekomendasi juga dapat dijadikan sebagai saran yang dianjurkan kepada instansi Diskominfo Kota Bandung dapat dibenarkan ataupun dikuatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas level yang sebelumnya kurang.

Tabel 6 Targetting Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Penjelasan Indikator	Eksisting Tingkat Kematangan	Target Tingkat Kematangan
Indikator - 1: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	5	5
Indikator - 2: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	4	5
Indikator - 3: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	4
Indikator - 4: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	2
Indikator - 5: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	3
Indikator - 6: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	5	5
Indikator - 7: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5	5
Indikator - 8: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5	5
Indikator - 9: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	3
Indikator - 10: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	1	2
Indeks Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,3	3,9

Tabel 6 memaparkan kondisi terkini dan kondisi harapan terkait aspek 1 dengan keterangan bahwa pelaksanaan implementasi SPBE pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola sudah mencapai indeks yang cukup baik yakni 3,3. Kebijakan Internal Tata Kelola instansi dinilai mampu untuk memenuhi visi dan misi SPBE instansi dengan penerapan sasaran/target yang dapat dicapai dan terukur. Beberapa indikator didalam aspek ini juga sudah mencapai tingkat kematangan pada angka 5 yang dapat disimpulkan bahwa aspek ini sudah hampir memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun beberapa rekomendasi yang ditawarkan ,yakni menyelaraskan dengan arsitektur SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Identifikasi Metode Pembangunan Aplikasi, Membuat bentuk Interkoneksi Layanan, Opsi pengaturan dalam menggunakan layanan jaringan, Memperbaharui audit aplikasi dan infrastruktur, dan Melengkapi surat Tim Koordinasi SPBE.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi tingkat kematangan kapabilitas proses yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi berpedoman kepada Permen PANRB 59/2020 dengan rekomendasi metode pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan penilaian mandiri terhadap data dukung yang didapatkan.
2. Hasil evaluasi yang didapatkan mendapatkan indeks Tata Kelola SPBE sebesar 3.9 untuk Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola
3. Beberapa saran dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas pelaksanaan SPBE yang ada di dalam instansi didapatkan diuraikan sebagai berikut:
 - 3.1. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan maupun regulasi yang ada didalam instansi sebagai wujud *continuous improvement* yang nyata didalam instansi.
 - 3.2. Menetapkan standar yang baku yang dapat digunakan oleh instansi berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Pusat.
 - 3.3. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja layanan terkait penggunaan aplikasi untuk mengetahui sejauh mana aplikasi telah memberi dampak baik untuk entitas instansi maupun entitas eksternal.
 - 3.4. Tetap melakukan konsistensi pada program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan arahan dari Koordinator SPBE dan juga memperbaharui program kerja yang dianggap tidak efektif .

Referensi:

[1]	Habibi, M. (2017). Evaluasi Implementasi Sistem E-Planning di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Metode PEGI.
[2]	Kementrian, P. A. (2018). Buku Reformasi Birokrasi.
[3]	SPBE, P. (2019). Monitoring & Evaluasi SPBE. Retrieved from Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 Pemerintah Kota Bandung: https://spbe.go.id/moneval
[4]	Kementrian, P. (n.d.). [LIVE] Sosialisasi PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Retrieved from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=l-e6gpw6puU
[5]	Kumano, Y. (2001). Authentic assessment and portfolio assessment in theory and practice. Shizuoka: Shizuoka University.
[6]	Menteri, P. A. (2020). PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. pp. 21-23
[7]	Kementrian, P. A. (2018). <i>Buku Reformasi Birokrasi</i> .
[8]	Menteri, P. A. (2020). PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. pp. 21-23
[9]	IT, G. I. (2003). <i>Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition</i> . IT Governance Institute.